



SKRIPSI

Oleh :

HENNY RIZKY DIANTI

NIM : 11724200660

PROGRAM SI

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DI DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR BERDASARKAN UU NOMOR. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HENNY RIZKY DIANTI
NIM : 11724200660

PROGRAM SI
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang ditulis oleh :

Nama : Henny Rizky Dianti
NIM : 11724200660
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 7 April 2021

H. RAHMAN ALWI, MA

NIP : 19700621 199803 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DI DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**, yang ditulis oleh:

Nama : **HENNY RIZKY DIANTI**
NIM : **11724200660**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 08 Juni 2021**
Waktu : **08.00 WIB**
Tempat : **Ujian Secara Online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

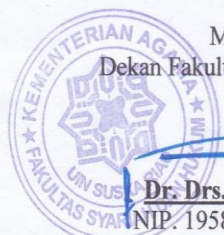
Pekanbaru, 28 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, MA

Penguji II
Bambang Hermanto, M.AG



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 1986031 005



ABSTRAK

Henny Rizky Dianti (2021) : *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan perkembangan perekonomian zaman, yang tidak hanya berlaku di kota-kota besar saja, yang mana desa juga berhak dalam kemajuan dalam bidang perekonomian dan keuangan sehingga terbentuklah kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan dilihat dari bagaimana salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian desa dibentuk lah BUM Desa.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan BUM Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 dan Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu peneliti yang dengan cara melakukan survei langsung kelapangan. Lokasi penelitian ini di lakukan di BUM Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir, Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Desa, 1 Ketua BUM Des 2 pegawai BUM Desa, 1 Ketua Badan Permusyawaratan Desa, 3 pegawai Desa dan 7 tokoh masyarakat yang mana dapat juga menilai bagaimana pengelolaan Badan Usaha milik Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dengan jumlah populasi yang relatif sedikit yang mana berjumlah 15 orang, penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan teknik *Total Sampling*. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang kemudia penulis analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah *Observasi*, *wawancara*, *dokumentasi*, dan *Pustaka*.

Berdasarkan hasil penelitian melalui *Observasi*, *wawancara*, *Dokumentasi* dan *Pustaka* dapat di ketahui bahwa pengelolaan BUM Desa belum maksimal dalam pengelolaannya jika dilihat berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pengelolaannya yang mana dipengaruhi kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengelola BUM Desa sehingga dalam pengelolaannya belum maksimal. Sedangkan dalam fiqh siyasah mailyah BUM Desa sudah hampir maksimal dalam pengeloannya. Yang mana sama sama dalam upaya meningkatkan ekonomi dan keuangan negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadiahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hadiah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, dan mengajarkan manusia dalam hal baik, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa**“ ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan apapun.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, aamiin yaa rabbala’alamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, memperbaiki, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

Terimakasih kepada Allah SWT yang selalu memberi kesehatan, kemudahan serta kekuatan dalam menyusun dan mengerjakan skripsi ini serta selalu mengingatkan bahwa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ialah suatu hal yang penting untuk dunia dan akhirat.

Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis tersayang dan keluarga tercinta yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memotivasi, memberi semangat dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moril maupun materil. Terimakasih kepada Ayahanda Yanuari tercinta dan Ibunda Suratmi tersayang serta adik-adik saya Shandi Ramadani dan Alya Jazila Islami, sekaligus keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.

Bapak Dr. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

Bapak Rahman Alwi, M. Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.

Ibu Jumni Nelly, M. Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberi saran, masukan, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Rahman Alwi, M. Ag yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah ngorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.

Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen telah mengajarkan banyak materi sehingga penulis banyak memperoleh ilmu selama masa perkuliaan ini.

Terimakasih kepada Pengelola Perpustakaan atas ilmu yang dibelikan serta peminjaman buku sebagai acuan referensi serta terimakasih kepada Bapak Ibu Siyasi dan Admin Fasih UIN SUSKA Riau yang selalu melayani dalam proses surat menyurat penulis.

10. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) baik itu senior ataupun junior yang telah memberikan bantuan, semangat, dan arahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang telah penulis dapatkan sebuah amal kebaikan disisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT baik dunia dan akhirat.

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada serta memohon kritikan dan saran yang bersifat membangun, memperbaiki, dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 22 Maret 2021
Penulis

HENNY RIZKY DIANTI
NIM. 11724200660



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II PENGELOLAAN BUMDES BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	14
A. Gambaran Umum Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	14
B. Pengeloaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014	20
C. Sejarah Umum Badan Usaha Milik Desa Kijang Makmur	26
BAB III TINJAUAN UMUM FIQH SIYASAH DAN PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA	29
A. Pengertian Fiqh Siyasa	35
B. Sumber Hukum Fiqh Siyasa Maliyah	36
C. Ruang Lingkup <i>Siyasa Maliyah</i>	40
D. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	TINJAUAN <i>FIQH</i> SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN BUM DESA KIJANG MAKMUR BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	59
	A. Pengelolaa BUM Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	59
	B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i> terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir	68
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN

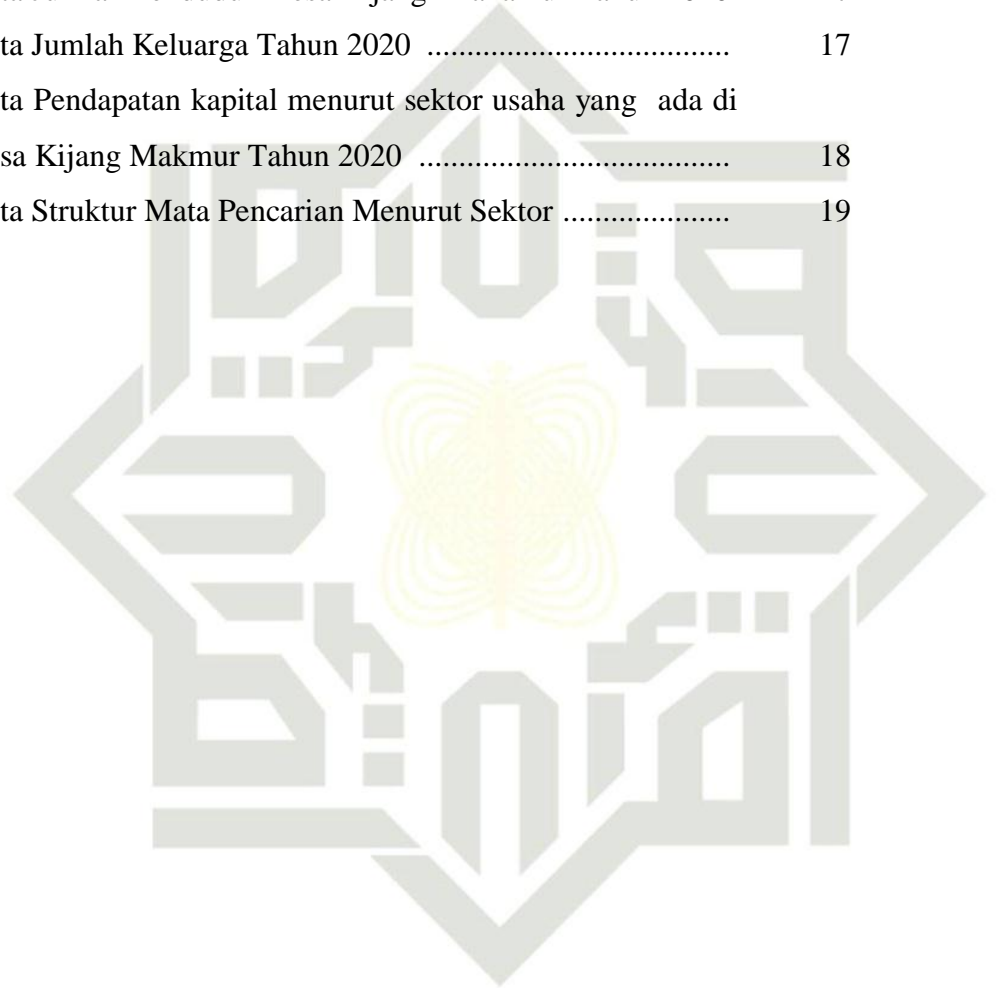


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Administrasi Kecamatan Tapung Hilir	14
Tabel 2.2	Data Status Penduduk Desa Kijang Makamur Tahun 2020 .	16
Tabel 2.3	Data Status Penduduk Desa Kijang Makamur Tahun 2020 .	16
Tabel 2.4	Data Jumlah Penduduk Desa Kijang Makamur Tahun 2020	17
Tabel 2.5	Data Jumlah Keluarga Tahun 2020	17
Tabel 2.6	Data Pendapatan kapital menurut sektor usaha yang ada di Desa Kijang Makmur Tahun 2020	18
Tabel 2.7	Data Struktur Mata Pencarian Menurut Sektor	19



UIN SUSKA RIAU

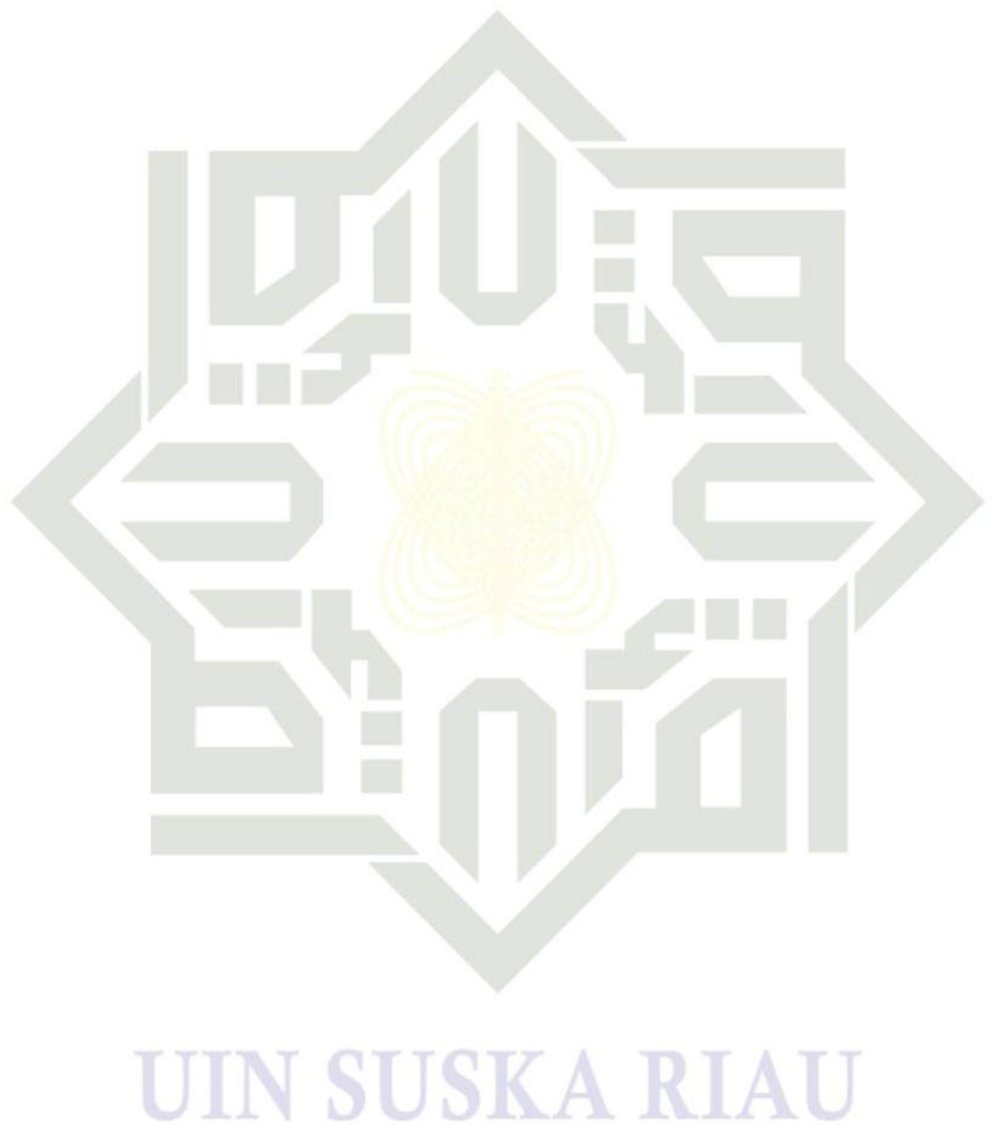


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Peta Tempat BUM Desa Kijang Makmur	27
Gambar 2.2	Peta Lokasi	28





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Neagara Republik Indonesia Tahun 1945, “ Negara Indonesia adalah negara hukum” yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang “.

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestur*). Adapun hukum yang berlaku tidak hanya berdasarkan hukum dari pemerintahan saja, melainkan juga disertai hukum sesuai dengan nilai ajaran Islam, yang mana nantinya akan mencapai tujuan yang menciptakanadilan, kamajuan dan kesejahteraan umum.¹

Merujuk dengan apa yang sudah di tulis di bagian atas dan juga merujuk pada rumusan tujuan Negara yang tercantum dalam Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 khusunya pada kalimat “ Memajukan Kesejahteraan Umum “.Dan dalam melaksanakan rumasan tujuan negara tersebut tidak hanya di laksanakan di Pemerintahan pusat saja, melainkan di pemerintahan daerah yang mencakup kepada Kesejahteraan Pemerintahan Desa.

¹ Abu Usamah Abdurrahmah,” *Perencanaan Dalam Kaidah Islam*”(On-line) diakses melalui: <https://islamisone.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/>(14 Juni 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang paling erat ataupun paling dekat dengan masyarakat, mempunyai peran paling penting diamanahkan oleh konstitusi sebagai jalan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan sebagian besar masyarakat di Indonesia ini merupakan masyarakat yang berasal dari desa. Dan dari hal yang terkecil lah suatu pemerintahan dapat dikatakan berhasil dengan melihat bagaimana pembangunan dan pengelolaan aset-aset ataupun sumberdaya ekonomi yang ada pada desa. Pengembangan dalam bidang ekonomi di pedesaan ini sudah sejak lama di terapkan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun belum mendapatkan hasil yang maksimal sesuai harapan yang diinginkan.

Sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. diharapkan mengenai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi ataupun terakomodir dengan lebih baik. Pemerintah memberi kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri yang mana diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan mengenai kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Undang-undang pelaksanaannya telah mengemankan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuklah dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki Desa.²

² A. Saebani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), hal 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu pemerintah membentuk suatu lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan (BUM Desa) yang berperan penting dalam pemerintahan desa yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dan mengenai pengelolaan keuangan Desa di jelaskan juga pada Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelaksanaan, pelaporan, perencanaan dan pertanggungjawaban Dan penjelasan tentang bagaimana mendirikan BUM Desa, bagaimana pedoman dalam pengelolaan BUM Desa, dan apa saja manfaat dari adanya BUM Desa itu di sebutkan dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peran besar yang diterima pemerintah khususnya di lembaga BUM Desa ini, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Karena itu pemerintah Desa haruslah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Yang mana nantinya di akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dan dalam hal ini BUM Desa wajib melakukan penyusunan laporan realisasi keuangan, yang mana laporan keuangan tersebut diperoleh melalui siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dana Desa.

Adapun dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan haruslah melibatkan masyarakat yang mana diawasi dan juga disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, sehingga program kerja terencana dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa yang ada. Selain itu pihak-pihak BUM Desa harus mampu minimal melakukan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh BUM Desa dengan berbagai pihak.

Adanya BUM Desa ini diharapkan dapat dan mampu membantu desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, membantu pembangunan untuk kemajuan desa, kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya itu adanya BUM Desa juga dapat membantu meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam pada desa. Sehingga BUM Desa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membantu meningkatkan kualitas desa. Akan tetapi peran dan tanggung jawab BUM Desa belum diimbangi oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas kepengurusan dari struktur organisasi BUM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa itu sendiri maupun dari dukungan pemerintah pusat serta masyarakat setempat. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantaun pembangunan Desa.

Pada penelitian ini mengkaji mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Yang Mana Desa Kijang Makmur ini merupakan desa yang memiliki BUM Desa yang berupaya untuk dapat membantu meningkatkan APD dan membantu dalam upaya mensejahterahkan masyarakat dengan mendirikan beberapa unit usaha. Dana yang diberikan pemerintah sudah tebagi rata dan dialokasikan dana tersebut untuk pendirian unit usaha seperti, Simpan Pinjam, Toko Harian, Bri Link, JNT dan Pos dan lahan Pertanian yang masih dalam proses perencanaan. Namun dalam beberapa tahun ini setelah diberdirikannya BUM Desa peningkatan mengenai APD tidaklah mengalami peningkatan, dan mengenai masalah pembinaan/pelatihan dan pemberdayaan baik untuk pemerintah desa khususnya pihak pihak BUM Desa dan juga masyarakat belum ada di desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Dari latar belakang yang telah dituliskan, penulis tertarik mengkaji lebih jauh terkait bagaimana pengelolaan BUM Desa yang ada. Mengenai pembahasan pengelolaan BUM Desa ini dirasa sangat berperan penting bagi penulis dalam menilai pengelolaan BUM Desa yang memiliki tujuan meningkatkan APD dan juga potensi pertumbuhan perekonomian desa. untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itu pengelolaan BUM desa harus dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM desa ini juga sangat penting untuk membantu mengembangkan upaya yang telah dilakukan BUM Desa sehingga lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana tercantum dalam Q.S. Ar-Ra'd :11) :

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di dalam sebelumnya, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan BUM Desa yang ada di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berdasarkan tinjauan *Fikih Siyasah Maliyah* yang mana perannya berpengaruh terhadap perekonomian desa dan kesejahteraan Masyarakat.

Tinjauan *Fikih Siyasah Maliyah* dijadikan kajian dan pembahasan yang mana berkaitan dengan kepentingan umum dalam masalah pengelolaan BUM Desa yang berkaitan dengan keuangan. Yang mana ada beberapa faktor yang sangat berkaitan dan berhubungan erat dalam hal ini, yaitu kekuasaan (struktur organisasi pemerintahan), rakyat (umat), dan juga Harta (keuangan).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Dalam batasan masalah ini terfokus pada bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pengelolaan BUM Desa Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Rumusan Masalah .

1. Bagaimana Pengelolaan BUM Desa Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis bagaimana pengelolaan BUM Desa Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Bersadar kan UU Nomer. 6 Tahun 2014.
2. Untuk memahami *Fiqh Siyasah* Terhadap pengelolaan BUM Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian yang saya lakukan adalah sebagai salahsatu bantuan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terkhususnya dalam bidang ilmu pemerintahan Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat pemerintah Desa. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa terkait untuk melaksanakan pemerintahan Desa yang lebih baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi kedepannya khususnya mengenai BUM Desa demi berjalannya pemerintahan yang baik sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya.

- b. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengetahuan masyarakat betapa pentingnya membatu aparat Desa dalam Pengelolaan BUM Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir.
- c. Bagi akademisi, memeberi sumbangsi keilmuan berbasis penelitian untuk memperkaya referensi mengenai Pengelolaan BUM Desa.

F. Metodologi Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan dan menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai raelita yang ditemukan yang bersifat naratif.

Menurut saya penelitian kualitatif (*qualitative Reserch*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Pendekatan diarahkan pada Latar Belakang objek dan individu tersebut secara utuh.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan juga Wawancara yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa dan sumber dari arsip BUMdesa .
- b. Data Sekunder, Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar penulis. Ataupun data sekunder atau sumber sekunder adalah sumber yang bersifat mendukung penelitian ini yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jurnal-jurnal dan buku,artikel-artikel.

3. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan BUM Desa seperti Kepala Desa, Ketua Badan Usaha Milik Desa, dan Masyarakat yang ada di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pengelolaan BUM Desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang mana itu adalah manusia, sikap, sifat, tingkah laku, benda, gejala dan sebagainya yang menjadi objek penelitian³. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Desa, 1 Ketua BUM Desa 2 pegawai BUM Desa, 1 Ketua Badan

³ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Pustaka Setia, 2011) h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permusyawaratan Desa, 3 pegawai Desa dan 7 tokoh masyarakat yang mana dapat juga menilai bagaimana pengelolaan BUM Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dengan jumlah populasi yang relatif sedikit yang mana berjumlah 15 orang, penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan teknik *Total Sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) secara real serta juga melihat kesejahteraan masyarakat Desa Kijang Makmur dengan adanya pengelolaan BUM Desa disana.
- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai oleh penulis ialah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Agama dan masyarakat Desa ataupun juga Pengurus Bada Usaha Milik Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir.
- c. Dokumentasi, adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histori*), Cerita, biografi peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

- d. Pustaka adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku – buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis data Kualitatif, yang mana penulis mengklasifikasikan data – data yang terkumpul dari lapangan, dan selanjutnya data dikelolah dan di analisis serta diuraikan secara rinci dan jelas, sehingga menghasilkan gambaran yang sepenuhnya tentang permasalahan yang diteliti.

7. Metode Penyajian Data

Ketika data sudah terkumpul seluruhnya, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode antara lain :

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data – data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus dan rinci.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta – fakta atau data – data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulannya secara umum.



- c. Deskriptif, yaitu metode yang menggunakan data –adata yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya dan real sesuai data yang didapat pada penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang singkat dan lebih mempermudah dalam penelitian, penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan dalam skripsi ini agar mudah terbaca oleh pembaca serta memudahkan penulis juga dalam penelitian. Mengenai pembahasan skripsi, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGELOLAAN BAUMDES BERDASARKAN UU No. 6 TAHUN 2014

Pada Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum. Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Gambaran umum BUMDes Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Serta Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan UU Nomer. 6 Tahun 2014.

BAB III : TINJAUAN UMUM FIQH SISAYAH DAN HAKIKAT PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bab ini menjelaskan teori Fiqh Siyasah yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa yang digunakan untuk menganalisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KIJANG MAKMUR BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014

Bab ini menjelaskan pembahasan Badan Usaha Milik Desa yang mana didalam bab ini menjawab dari pada rumusan masalah yang berdasarkan landasan teori yang tertera pada bab tiga, yang mana yang pertama adalah Analisis Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 dan yg selanjutnya di tinjau Dari *Fiqh Siyasaah Maliyah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini dan sebagai penutup, yang mana isinya memuat mengenai kesimpulan – kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang juga di lengkapi oleh saran – saran, sdan menyertakan lampiran – lampiran yang di anggap perlu di cantumkan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PENGLOLAAN BUMDES BERDASARKAN UU

NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Gambaran Umum Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

1. Letak Geografik Kecamatan Tapung Hilir

Kecamatan Tapung Hilir berdiri pada tahun 2000 setelah mekar dari kecamatan Tapung secara geografis Kecamatan Tapung Hilir mempunyai luas wilayah 84,072 Ha dan terletak antara 0.40 Bujur Timur dan 1,01 LINTANG Utara dengan ketinggian diatas permukaan laut berkisar antara 100 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian Timjt merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian lebih rendah, yang berkisar antara 5-11 meter. Kecamatan Tapung Hilir mempunyai 16 Desa dengan 13 Desa Trasmigrasi dan 3 Tempatan dengan pusat pemerintahan berada didesa Kota Garo. Kecamatan Tapung Hilir dibelah oleh aliran Sungai Tapung Kanan, yang mengalir dari barat hingga ketimur, serta memiliki beberapa anak sungai.

Data Wilayah Administrasi Kecamatan Tapung Hilir

Tabel 2.1
Data Administrasi Kecamatan Tapung Hilir

No	Desa Kelurahan (1)	Luas Wilayah (2)	Presentase (3)
1	Sekijang	15.825	18,2
2	Tebing Lestari	997	33,2
3	Kijang Jaya	820	15,0
4	Tanah Tinggi	640	1,69
5	Tapung Makmur	599	0,67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Kelurahan		Luas Wilayah	Presentase
No	(1)	(2)	(3)
6	Tapung Lestari	922	2,0
7	Kota Garo	13.151	1,13
8	Suka Maju	586	0,90
9	Kota Baru	1.482	0,71
10	Kota Bangun	1.804	0,61
11	Cinta Damai	794	0,86
12	Beringin Lestari	621	0,73
13	Tandan Sari	539	1,3
14	Kijang Makmur	17.905	0,93
15	Kota Aman	29.308	20,50
16	Gerbang Lestari	1.195	1,14
Tapung Hilir		87.325	100

Sumber : Kantor Camat Tapung Hilir

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa desa kijang makmur merupakan salah satu desa terluas dikecamatan Tapung Hilir dengan luas wilayah yaitu 17.905 Ha dengan persentase 0,97% . Dan Desa Tanah Tinggi salah satu desa dengan wilayah kurang luas yaitu 640 Ha dengan persentase 1,69 %⁴.

2. Letak Geografis Desa Kijang Makmur

Desa kijang makmur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berdiri pada tahun 1997 dengan luas wilayah 3.178 Ha/M2 koordinat Bujur N 0°50'35.9736", koordinat Lintang E 101°3'16.4088", ketinggian DPL 48 M

Desa/Kelurahan	KIJANG MAKMUR
Kecamatan	TAPUNG HILIR
Kabupaten/Kota	KAMPAR
Provinsi	RIAU
Bulan	JANUARI
Tahun	1997
Luas (Ha)	3.178 HA/M2

⁴ Arsip Data Desa Camat Tapung Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koordinat Bujur	N 0°50'35.9736"
Koordinat Lintang	E 101°3'16.4088"
Ketinggian DPL (M)	48 M
Terluar di Kecamatan	Ya / Tidak
Terluar di Kabupaten/Kota	Ya / Tidak
Terluar di Provinsi	Ya / Tidak
Terluar di Indonesia	Ya / Tidak
Nama pengisi	WAHYU RAMADHAN
Pekerjaan	WIRASWASTA
Jabatan	SEKETARIS DESA

Sumber : Kantor Desa Kijang Makmur⁵

3. Keadaan Penduduk Desa Kijang Makmur

a. Pengangguran

Table 2.2
Data Status Penduduk Desa Kijang
Makamur Tahun 2020

Kelompok Usia	Jumlah (Orang)
1.Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	467
2.Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	239
3.Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	359
4.Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1.195
5.Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	121
6.Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	4
7.Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	5

b. Kesejahteraan Keluarga (Analisis DDK)

Table 2.3
Data Status Penduduk Desa Kijang
Makamur Tahun 2020

1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	21
2.	Jumlah keluarga sejahtera 1	151
3.	Jumlah keluarga sejahtera 2	725
4.	Jumlah keluarga sejahtera 3	159
5.	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	4
6.	Total jumlah kepala keluarga	1.002

⁵ Arsip Data Desa Camat Tapung Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 2.4
Data Jumlah Penduduk Desa Kijang
Makmur Tahun 2020

Jumlah	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah Penduduk Tahun ini	2.150	1.993
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	2.100	1.973
Persentase Perkembangan	1,2%	1,01%

Sumber : Kantor Desa Kijang Makmur 2020

Dari data diatas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk desa Kijang Makmur dari tahun ketahun mengalami kenaikan, penduduk laki-laki mengalami perkembangan hingga 1,2% sedangkan Perempuan mengalami perkembangan hingga 1,01%⁶.

Table 2.5
Data Jumlah Keluarga Tahun 2020

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah KK tahun ini	1.017	43	1.060
Jumlah KK tahun lalu	1.012	41	1.053
Persentase perkembangan	1,0 %	1,05 %	1,01 %

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur 2020

Dari data diatas bisa dilihat jumlah Keluarga tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah total Kepala keluarga Laki-laki tahun ini 1.017 KK dan tahun lalu 1.012 KK, jadi jumlah persentase perkembangan pada kepala keluarga laki-laki yang ada di desa Kijang Makmur tahun 2020 sebesar 1,0 %. Sedangkan Kepala Keluarga Perempuan dari tahun ini 42 KK dan tahun lalu sebesar 41 KK, jadi jumlah persentase perkembangan pada kepala keluarga perempuan yang ada di Desa Kijang Makmur tahun 2020 sebesar 1.05% jadi jumlah total keseluruhan persentase perkembangan pada Kepala Keluarga yang ada di Desa Kijang Makmur 2020 yaitu sebesar 1,01 %⁷.

⁶ Arsip Data Desa Camat Tapung Hilir

⁷ Arsip Data Desa Camat Tapung Hilir.



4. Keadaan Ekonomi Desa Kijang Makmur

Tabel 2.6
Data Pendapatan kapital menurut sektor usaha yang ada di Desa Kijang Makmur Tahun 2020 yaitu :

Sektor Usaha	Jumlah rumah tangga (Keluarga)	Jumlah Anggota rumah tangga (Orang)	Jumlah rumah tangga buruh (Keluarga)	Jumlah anggota rumah tangga buruh (Keluarga)	Jumlah Pendapatan perkapita (Rp)
1 Pertanian	4	15	2	4	2.050.000
2 Perkebunan	796	2.388	526	2.616	2.596.000,-
3 Peternakan	1	1	3	6	2.750.000,-
4 Perikanan	7	24	4	4	2.150.000,-
5 Kerajinan	0	0	0	0	0
6 Pertambangan	0	0	0	0	0
7 Kehutanan	0	0	0	0	0
8 Usaha menengah kecil dan Besar	0	0	0	0	0
9 Jasa dan Perdagangan	32	98	4	4	2.275.000

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur 2020

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa sektor usaha yang banyak jumlah keluarga dan orang pada pendapatan masyarakat di desa Kijang Makmur masih mendominasi pada sektor usaha perkebunan, sedangkan jumlah pendapatan perkapital terbesar yaitu peternakan dengan jumlah Rp 2.750.000,-. Perkebunan sejumlah Rp 2.596.000,-. Jasa dan Pedagang sejumlah Rp 2.275.000,-. Perikanan sejumlah Rp 2.150.000,-. Dan pertanian sejumlah Rp 2.050.000,-⁸.

⁸ Sumber Data Kantor Desa Kijang Makmur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Table 2.7
Data Struktur Mata Pencarian Menurut Sektor

Sektor Mata Pencarian	Jumlah Pemilik Usaha (Orang)	Jumlah Pemilik Usaha Perorangan (Orang)	Jumlah Buruh/karyawan /Pengepul (orang)
Pertanian	14	14	50
Perkebunan	348	348	70
Peternakan	1	7	4
Perikanan	7	0	13
Kehutanan	0	0	0
Pertambangan dan Bahan Galian C	0	0	0
Perdagangan	32	32	32

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur

Dari data diatas dapat dilihat dari struktur mata pencarian dari jumlah pemilik usaha , jumlah pemilik usaha perorangan, dan jumlah buruh dan kariawan/pengepul lebih banyak disi oleh sektor mata pencarian perkebunan dengan jumlah pemilik usaha perorangan sebanyak 348 orang, jumlah pemilik usaha perorangan sebanyak 348 orang, dan jumlah buruh/karyawan/pengepul sebanyak 70 orang⁹.

Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun 2020 ini sebesar Rp. 1.288.075.500,- dengan bantuan pemerintah kabupaten/kota/retribusi dan bagi hasil pajak sebesar Rp 31.384.500,- . bantuan pemerintah Provinsi Rp. 100.000.000,-. Bantuan pemerintah Pusat Rp. 710.381.000,-, Alokasi Dana Desa Rp. 446.310.000,-. Jumlah belanja public/belanja pembangunan Rp. 1.008.054.550,-. Jumlah belanja apratur/pegawai sebesar Rp. 232.131.600,-. Sedangkan Pendapatan Asli Desa Rp. 0,-.

⁹ Sumber Data Kantor Desa Kijang Makmur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Menurut Undang – Undang No.6 Tahun 2016 Tentang Desa, desa adalah sebagai berikut¹⁰ :

“ Desa dan desa adata atau disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dakam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia “

Walaupun Desa merupakan bagian terkecil dari sebuah Negara namun bukan berarti desa tidak mampu mengembangkan keadaan Desa itu sendiri, baik dari segi bagaimana peningkatan sistem pemerintahaan Desa, peningkatan pembagunan Desa hingga bagaimana peningkatan pendapatan ataupun perekonomian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Desa juga merupakan tempat di suatu daerah yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan disebuah negara.

Maka sekarang sudah banyak sekali peraturan yang membahas mengenai Desa dan bagaimana cara pengelolaannya agar dapat membantu menggali potensi Desa itu sendiri, yang mana salah satu dari cara untuk melakukan peningkatan pendapatan Desa ataupun peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan adalah usaha milik Desa atau biasa di sebut dengan BUM Desa. Adapun pengertian dari BUM Desa berdasarkan pasal 1 angka (6) Undang – undang No. 6 Tahun 2014 adalah “ Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal

¹⁰ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5495.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah dan PDRT No.4 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kesejahteraan masyarakat desa dapat mulai tercapai apabila masyarakat mampu memaksimalkan BUM Desa. Oleh karena itu Bumdesa memiliki Fungsi penting dalam perekonomian Desa adalah¹¹ :

- 1) **Lembaga Perantara** : BUM Desa mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara *surplus unit* (masyarakat yang kelebihan dana) dan *deficit unit* (masyarakat yang kekurangan dana). BUM Desa juga berinteraksi dengan kedua pihak tersebut dalam akad kerja sama.
- 2) **Perantara Pemasok** : Selain masalah terbatasnya sumber permodalan, terdapat juga kesulitan dalam hal pengadaan bahan baku untuk kegiatan produksi bagi masyarakat Desa. Oleh karena itu , BUM Desa juga bertindak sebagai perantara pemasok yang membantu masyarakat dalam hal pengadaan bahan baku.
- 3) **Distributor** : Agar mengatasi kesulitan masyarakat dalam hal ini pemasaran produk unggulan Desa, BUM Desa juga berperan sebagai distributor untuk membantu sampainya produk tersebut di pasar, baik

¹¹David Wijaya, *Mengelola produksi BUM DESA Secara Profesional*, Yogyakarta, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung (melalui pasar, toko, dan semacamnya) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti toko online).

- 4) **Fasilitator** : Fokus BUM Desa tidak hanya pada masalah konsumsi, produksi, dan distribusi masyarakat Desa, tatapi juga membantu masyarakat Desa agar dapat mengembangkan keterampilan dalam berusaha atau meningkatkan kualitas SDI atau sumber daya Insani sebagai pelaku utama dalam pengelolaan SDA serta potensi Desa melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta pemantauan Desa.

Dan oleh sebab itu dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa disebutkan bahwa :

- 1) Desa Dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- 2) BUM Desa dikelola dengan samangat Kekeluargaan dan Gotong Royong.
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Alat untuk mendukung kemajuan dari suatu desa ialah, sistem pemerintahan desa itu sendiri, orang- orang yang bekerja didalamnya, partisipasi masyarakat, ekonomi dan administrasi. Didalam suatu Desa keadaan ekonomi sangatlah berpengaruh dalam keberhasilan suatu Desa. Maka salah satu sumber dari yang mampu mendukung pedapatan Asli desa atau (PAD) adalah hasil dari Badan Usaha Milik Desa. Yang mana tugas serta peranan BUM Desa ini adalah meningkatkan perekonomian Desa, meningkatkan pendapatan asli Desa. Apabila pemerintah Desa dapat maksimal dalam mengelolah tidak menutup kemungkinan BUM Desa merupakan suatu sumber yang sangat berpengaruh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan BUM Desa ini dilakukan oleh lembaga Desa bersama dengan masyarakat yang mana agar lebih memudahkan dalam mewujudkan harap agar mampu secara maksimal dalam pengelolaan sehingga dapat dengan cepat pula mampu meningkatkan perekonomian ataupun pendapatan desa. Partisipasi masyarakat sangatlah berpengaruh dalam hal ini. Adapaun dalam Pasal 90 Undang-undang No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa : “ Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :

- a) Memberikan hibah dan / atau akses permodalan :
- b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar ; dan
- c) Memprioritaskan BUM Desa dalam Pengelolaan sumber daya alam desa.

Dalam pasal 90 menjelasakn bahwasanya pemerintah pusat yakni Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupten/Kota memberi dorongan yang kuat dalam membantu pemerintah Desa agar mampu menjalankan atau membangun perekonomian Desa dengan di adakannya BUM Desa melalui tiga poin yang ada di pasal 90 di atas. Jika dari sela aspek yang ada itu terlaksana dengan baik tentunya BUM Desa dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk menangani masalah perekonomian dengan cara memobilisasi pengeloaan aset Desa serta membantu mendukung usaha usaha kecil yang ada didalam masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aset Desa berdasarkan yang tertera dalam Undang – undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 76 bahwa :

“ Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa “ dan adapun aset Desa lainnya adalah¹² :

1. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Pendapatan Desa.
2. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
3. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain – lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Hasil kerja sama Desa.
5. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sejenis.

Di jelaskan juga di Pasal 77 ayat (1) dan (2) bahwa :

- 1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- 2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan Pendapatan Desa¹³.

Undang – undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan kepada kita semua

bagaimana pendirian dan pengeloan BUM Desa yang tetera dalam pasal 87 hingga pasal 90 ialah pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa yang

¹² Muhammad Muiz, *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, hlm, 131.

¹³ Pasal 77 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mana BUM Desa haruslah dibangun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong serta menjalankan usaha di bidang ekonomi, bisnis ataupun pelayanan umum yang mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Desa¹⁴. Yang mana BUM Desa dibentuk melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan kesepakatan terhadap hal yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 dapat diambil kesimpulan bahwasanya keberadaan BUM Desa haruslah didirikan di setiap Desa yang dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat yang juga harus ikut serta dalam proses pengelolaan Desa di Desa yang akan diadakan atau didirikannya BUM Desa.

Perencanaan dan pendirian BUM Desa berdasarkan inisiatif masyarakat. BUM Desa sebagai lembaga yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Pendirian BUM Desa ini berpedoman berdasarkan Undang – undang yang mengaturnya maka sebab itu, segala persiapan yang dilakukan oleh pendirian sebuah BUM Desa harus berpedoman pada peraturan yang mengaturnya. Adapun peraturan yang mengatur mengenai pendirian dan pengelolaan BUM Desa ini diantaranya ialah UU. No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 4 Tahun 2015.

¹⁴ Sutoro Eko, dkk, Modul pelatihan Petugas Pendampingan Desa : Implementasi Undang – Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sejarah Umum Badan Usaha Milik Desa Kijang Makmur

BUM Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir ini merupakan bada usaha yang sedang mencoba untuk melakukan trobosan – trobosan yang berupaya untuk membantu meningkatkan upaya peningkatan perekonomian desa baik untuk Pemerintah Desa atau pun untuk Seluruh Masyarakat yang tinggal khususnya di Desa Kijang Makmur.

Adapun sejarah umum dari BUM Desa Kijang Makmur ini yaitu berdiri sedikit lebih lambat dari sejak di berlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana baru berdiri di tahun 2017. Dimana di tahun 2017 Badan Usaha Milik Desa Kijang Makmur melakukan upaya untuk membantu masyarakat dalam pelayanan sosial yaitu mengadakan “ Simpan Pinjam “ kepada masyarakat yang mana telah disetujui dan di musyawarah kan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa serta masyarakat desa itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua BUM Desa Kijang Makmur tahun 2021 ini menyatakan upaya pelayanan sosial untuk masyarakat yang berupa Simpan Pinjam tidak berjalan sesuai sebagaimana kesepakatan masyarakat dan pemerintah desa.

Kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan transaksi dalam upaya simpan minjam untuk pembayaran rutin kepada BUM Desa yang mengakibatkan terkendala masalah dana hingga tahun 2018. Dan pada tahun 2019 BUM Desa Kijang Makmur mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 153.000.00 Kurang lebih yang mana dana tersebut di alokasikan dalam pembuatan Minimarket kecil yang mana di dalam nya juga menyediakan Kredit Elektronik dan BRI Link .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

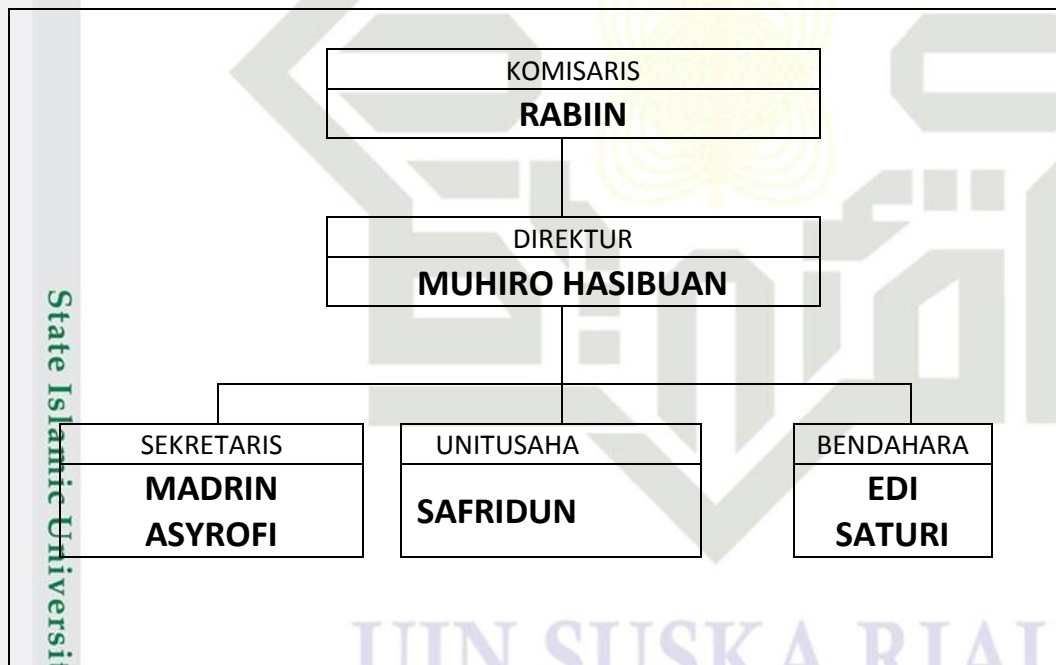
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tahun 2020 BUM Desa Kijang Makmur mendapatkan dana dari Pemerintah Sebesar Rp. 54.250.000 yang mana dana tersebut dialokasikan dengan mendirikan lahan pertanian sebagai wadah penanaman budidaya Cabe Merah yang mana sekang sudah ada nama Khusus untuk BUM Desa yang mana di beri nama “ BUM Desa Jaya Makmur Abadi “ .

Adapun gambaran Umum Struktur Organisasi dan Peta Tempat BUM Desa Kijang Makmur.

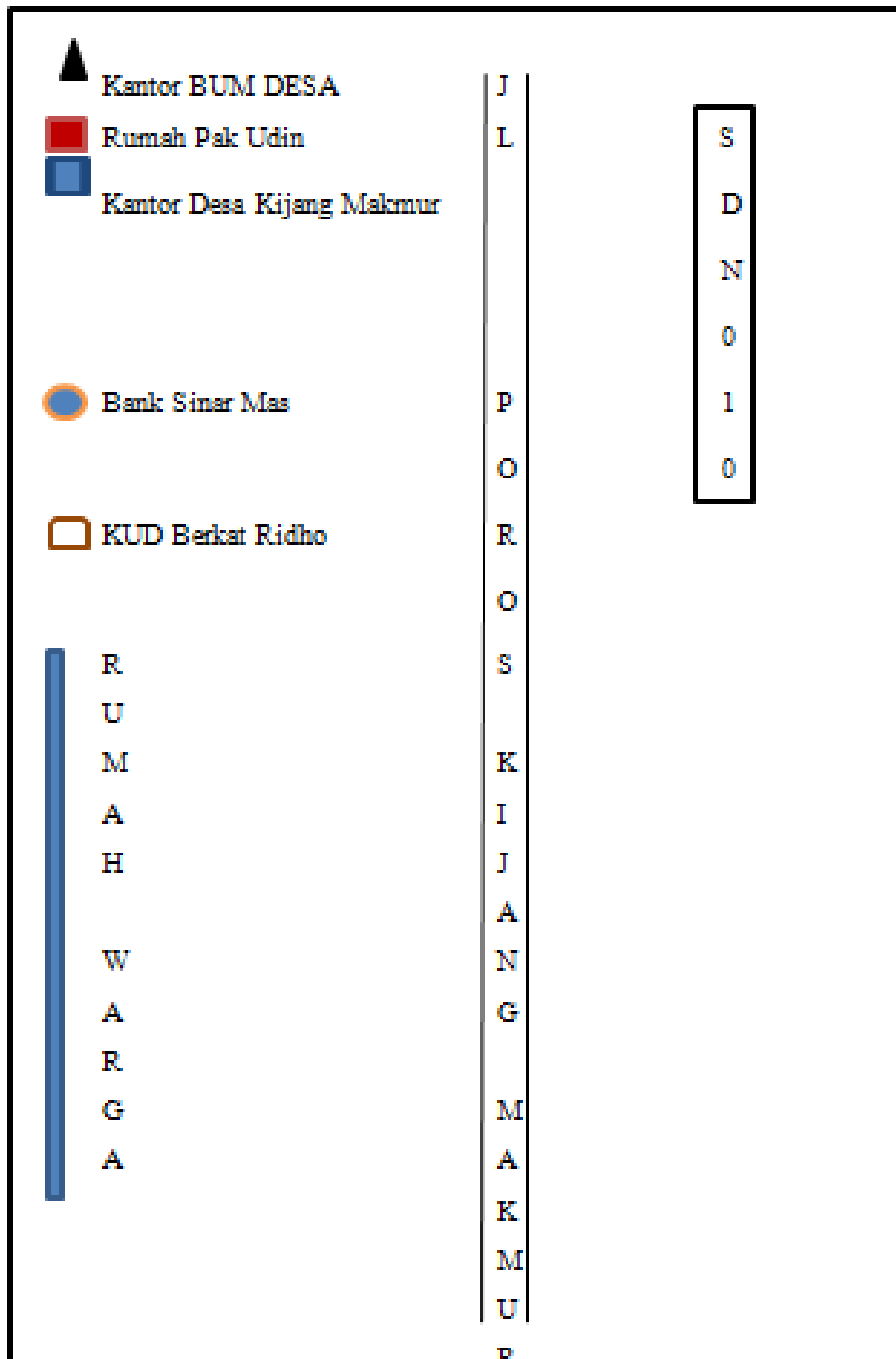
Struktur Organisasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Peta Tempat BUM
Desa Kijang Makmur



Peta Lokasi

Gambar 2.2
Peta Lokasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

TINJAUAN UMUM FIQH SIYASAH DAN PRINSIP – PRINSIP

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian islam itu merupakan peranan yang sangat penting. Para ulama dan pakar ekonomi islam sepanjang sejarah telah membahas peran negara dalam perekonomian, menurut para ulama, dalam meningkatkan perekonomian negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan syarat bahwa tugas tersebut dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawara .¹⁵ pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan bersama adalah tujuan yang meningkatkan kesejahteraan, baik dalam bidang pembangunan ekonomi. Pemebangunan perekonomian adalah proses dimana pemerintah dan oorang-orang terkait mengelola sumber daya dan membentuk model anatara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat mengubah perekonomian menjadi lebih maju.¹⁶

Negara melakukan peran penting ialah merupakan usaha dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup. Dalam masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, nagra harus menjamin dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk menggunakan sumberdaya ekonomi. Maka

¹⁵ Peran Pemerintah Terhadap Perekonomian, Artikel Universitas Dsarusslam Gontoor, <https://hes.unida.gontor.ac.id/peran-pemerintah-terhadap-perekonomian-islam> di akses pada 29 juni 2021 pukul 12: 26”

¹⁶ <https://gusvirossafutri.blogspot.com/2016/111/moral-0-false-false-false-in-x-none-ar>. Di akses pada 29 juni 2021”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan itu pemerintah harus mengatur dan mendistribusikan penggunaan sumber daya ekonomi secara adil dan merata.¹⁷

Adapun menurut islam, negara memiliki hak melakukan intervensi dalam kegiatan meningkatkan perekonomian yang dilakukan oleh individu, baik untuk memantau kegiatan atau untuk mengatur atau melakukan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh individu. Partisipasi negara dalam kegiatan ekonomi pada awal Islam sangat kurang dikarenakan kegiatan perekonomian yang masih sederhana karena kemiskinan lingkungan di mana islam muncul. Dalam sistem peningkatan perekonomian apa pun, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau pun ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting dalam, peran yang sangat luas dalam sistem ekonomi sosial yang mana dikembangkan oleh Adam Smith yang menyatakan teori pemerintahan memiliki tiga fungsi¹⁸ :

1. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan.
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bangunan, dan fasilitas umum lainnya.

Pemerintah masuk kedalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian yang bertujuan untuk memajukan dan menyejahterakan negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai kepentingan hidup banyak orang. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran dalam mengatur, meningkatkan atau

¹⁷ Ani sri sahayu, "Pengantar Kebijakan Fiskal " (Jakarta : Bumi Aksara, 2010 : 14)

¹⁸ Muhammad' Abid Al-Jabri, " Agama Negara dan Penerapan Syariah " (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001, 20).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan kegiatan sektor swasta. Peran pemerintah dalam di klasifikasikan dalam tiga bentuk utama yaitu :

1. Peranan Alokasi

Peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga biasa disebut sebagai barang publik. Karena dalam sistem ekonomi suatu negara, tidak semua barang di pasok oleh sektor swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Jadi dalam hal ini pemerintah harus dapat menyediakan barang-barang publik. Kegiatan pengalokasian faktor-faktor produksi atau barang jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk secara efektif memenuhi kebutuhan pribadi atau individu secara kebutuhan masyarakat yang tidak dipengaruhi dan kegiatan pertahanan keamanan secara merata.¹⁹

2. Perana Distribusi

Peranan distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan di setiap daerah baik itu provinsi atau pun kota. Sementara masalah keadilan itu terlalu kompleks, karena keadilan adalah salah satu masalah yang dapat dipertimbangkan oleh sebagai persepsi, pernyataan tentang keadilan juga tergantung pada visi keadilan masyarakat itu sendiri. Kegiatan untuk mencapai redistribusi

¹⁹https://www.kompasiana.com/amp/ratudevi/peranan-pemerintah-dalam-perekonomian_55ea7e5a33311ae2dba81bb#aoh=15752100621329&ac=1575210141777&cs&referrer=https%3AA%2fwww.google.com%amp



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penadaptasi atau transfer pendapatan memberi koreksi pada distribusi pendapatan yang ada dimasyarakat. Pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh langsungnya ialah perpajakan progresif, yang mana mengenakan pajak yang relatif tinggi pada orang kaya dan rendah kepada orang miskin. Secara tidak langsung seperti kebijakan pengeluaran pemerintah misalnya, pembangunan tipe rumah sederhana dan sangat sederhana yang memiliki lebih banyak rumah mewah.

3. Peranan Stabilitas

Peran stabilitas ialah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan membangun kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Peranan stabilitas pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilkan perekonomian²⁰.

Sementara menurut, Barton menyebutkan bahwa peranan pemerintah secara garis besar ialah:

1. Peran alokasi sumber daya

Peran alokasi sumber daya mencakup pertanyaan menentukan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam pemerintahan perekonomian (keseimbangan masyarakat dan pribadi) dan penyediaan barang publik dan layanan bantuan sosial lainnya.

²⁰ Ibid, "Peranan Pemerintah dalam perekonomian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran regulator

Peran ini ialah termasuk hukum pen peraturan yang diperlukan untuk masyarakat, termasuk hukum yang mengatur dua bisnis yang mencakup untuk memfasilitasi kegiatan komersial dan hak milik pribadi.

3. Peran kebijakan jaminan sosial

Peran kebijakan jaminan sosial ini ialah yang medorog pemetaan sosial dinegara seperti perpajakan, jaminan sosial (pemberdayaan tranfer) dan penyediaan sejumlah barang publik yang bercampur tangan dengan masyarakat.

Adapaun dalam tugas tugas yang harus di emban oleh pemerintah dalam meningkatkan perkonomian dan mensejahterakan rakyat baik itu yang ada di desa maupun yang ada di kota ialah :

1. Mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian, yang mana pemerintah harus memanttau perkembangan ekonomi, seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut, baik dalam sistem pembelian ataupun penjualan, dan dalam produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Yang harus memantau ialah tim independen (*abl al hisbah*) tim ini mengawasi badan badan, pabrik, dan kepemilikan lainnya agar tidak mendapat manfaat yang tidak tesentuh masyarakat dengan menggunakan kepolosan dan ketidaktahuan mereka unruk memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari semangat nol moralitas.
2. Menghentikan muamalah yang diharapkan

Yang dimaksud dengan muamalah kategori haram adalah berbagai bentuk dari muamalah yang dilarang karena mereka bertentangan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip Islam, yang didasarkan pada moralitas dan mempertahankan manfaat publik seperti riba, penimbunan dan monopoli. Islam sangat peduli dengan ekonomi rakyat, jadi Islam adalah jaminan untuk melindungi harta benda setiap orang, sehingga tidak digunakan secara sembarangan atau secara resmi. Islam benar-benar melarang penggunaan properti secara kejam dalam perekonomian negara.

Sejauh menyangkut tempat pembuangan akhir, negara berkewajiban untuk memerangnya dengan keras dan kejam, meskipun diperoleh dengan secara paksa memindahkan barang-barang yang disimpannya, kemudian menjual kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga yang wajar dan wajar serta keuntungan yang wajar.

3. Tetapkan harga jika perlu

Ahli Fiqh tidak setuju dalam hal penetapan harga, tidak sah atau sah. Ada beberapa yang menguduskan mengapa ada sejumlah teks yang melarang penetapan harga. Di antara ini adalah kisah Anas dari Rasul SAW: sesuatu di mana ada krisis pada zaman Nabi, sehingga para sahabat memintanya untuk menetapkan harga barang: “seandainya Anda ingin menetapkan harga barang” dia menjawab: sebenarnya Allah SWT yang maha kuasa, mencakup segala, jujur dan beruntung. Tentunya tidak ada penghargaan jika Tuhan ditakdirkan, jadi tidak ada yang meminta saya untuk melakukan kejahatan yang saya lakukan kepada seseorang yang menentang darah dan kekayaan. Dasar hukum dan bidang-bidang yang dapat dan tidak dapat diintervensi oleh negara²¹

²¹ Ifnil Nur Diana “ *Hadiist-Hadist Ekonomi* “, (Malang: UIN Malang Pres, 2018, 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas mengenai peranan penting pemerintah dalam meningkatkan perekonomian yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sama dengan pa yang di cita- citakan oleh islam sejak dahulu di dalam sejarah islam. Yang mana di sebut dengan *siyasah Maliyah* yang mana membahas mengenai tentang keuangan degara yang mana berperan penting juga dalm meningkatkan perekonomian yang ada ppada suatu negara.

A. Pengertian Siyasah Maliyah

Sebelumnya diatas sudah di bahas mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* yang mana juga sudah disebutkan apa apa saja pembagiannya, yang salah satunya ialah *Siyasah Maliyah*. *Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapaun *fiqh maliyah* dalam prespektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah Nabi dan ppraktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* merupakan kajia yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad SAW. *Fiqh Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut mengenai anggaran pendapatan belanja negara.²²

Fiqh Siyasah Maliyah yang mengatur tentang hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, dan sumber-sumber keuangan Negara, dan sebagainya.

²² Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000. Hlm, 273.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah maliyah pada proses pengaturannya terfokus pada kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fiqh *siyasah maliyah* adalah mengatur politik keuangan.²³ Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak masa pemerintahan di madina. Dengan itu kaum muslimim mendapat ghanimah atau harta rampasan perang.

B. Sumber Hukum Fiqh Siyasah Maliyah

1. Al-qur'an

Secara etimologi al-quran adalah bentuk masker dari kata *qa-ra-a-se-wazan* dengan kata *fu'lan* yang artinya bacaan: berbicara tentang apa yang ditulis padanya : atau melihat dan menelaah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-qiyamah ayat 17 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman²⁴:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ

“ *sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membaca.*

Kata quran digunakan dalam arti sebagai kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Alquran yang diturunkan.²⁵ Al qur'an merupakan sumber hukum fiqh bawah hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT, maka ketentuannya itu

²³ Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara, Surabaya, 2014, hlm, 911.

²⁴ Q.S. Al-Qiyamah, (29) : 17.

²⁵ Ibid, 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang disebut alquran dengan demikian di tetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum islam yang utama.

Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seorang ini ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk dari quran tidak boleh melakukan sesuatu yang bertetangan dengan al-qur'an. Dan darisini bisa mengambil sumber hukum selain al-qur'an tetapi tidak boleh menyalahi dengan apa yang diterapkan dalam al-quran itu sendiri. Adapun ketentuan dalam alkuaran itu menetapkan prinsip-prinsip diantaranya :

- a. Memberi kemudahan dan tidak memberi kesulitan
- b. Menyediakan tuntunan
- c. Bertahap dalam menerapkan hukum
- d. Sejalan dengan kemaslahatan manusia²⁶

Dalam fiqh *siyasah maliyah* sumber alquran sebagai sumber hukum. Dimana di dalamnya dijelaskan mengenai penyelesaian masalah tentang keuangan negara dan pendapatan Negara. Dan adapun salah satu sumber hukum fiqh *siyasah maliyah* dalam al-quran yaitu surat al-Hasyr ayat 7²⁷.

²⁶ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Panggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2013. Hlm. 64.

²⁷ Q.S. Al-Hasyr (28) : 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٠﴾

Artinya: “apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada rasulnyadari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepada mu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagi mu, maka tinggalkanlah dan berdakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya “

Dan juga disebutkan di surah Al-Luqman ayat 20²⁸ :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى

وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang dilagit dan apa yang di bumi dan menyempurkan untuk nikmat-Nya lahir dan batin dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keEsaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang mmemberi penerang “.

Al- Hadist

Secara etimologi hadist berarti *jadid*, baru, lawan dari *qodim*, lama.

Qorib, dekat lawan dari *ba'id*, jauh dan *khobar*, berita. Khabar diartikan sebagai sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang (*ma yatahaddatsu bihi wa yungalu*). Dari makna tersebut, terambilah

²⁸ Q.S. Luqman (21) : 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan hadist Rasulullah SAW hadis yang bermakna berita ini dihubungkan dengan kata *tahdits*, yang berarti periwayatan atau *ikhbar* yang berarti menggambarkan.²⁹

Dalam terminologi *muhadditsin*, hadis didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan dan persetujuan, serta sifat yang didasarkan (*udhifa*) kepada Nabi SAW. Itu berarti tidak semua apa yang dikategorikan sebagai sebuah hadis adalah benar-benar dipastikan berumber dari Nabi Muhammad SAW, sebab semuanya bersifat *ma'nawi* dari pada *lafzhi*. Akibatnya, hadis rentan dengan distori, manipulasi dan pemalsuan. Itulah sebabnya, di dalam terminologi hadis, ada istilah hadis palsu (*hadits maudhu'i*) hadis lemah (*hadits al-dha'if*) dan hadis munkar (*hadits al-munkar*³⁰).

Pada prinsip hadis nabi berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap al-qura'an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh al-qura'an secara terbatas. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-qur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang disyariatkan. Tetapi pengalaman hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak terlaksanakan menurut apa adanya sebelum diberi penjelasannya nabi³¹

²⁹ T. M. Hasbi Al-Shiddieqi, *sejarah dan pengantar Hadis*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm, 1.

³⁰ Tasbihjmi, " *Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis* ", Jurna Al-Ulum, Vol, 11, No, 1, Juni, 2011, hlm, 4.

³¹ Tasbih, " *Kedudukan dan Fungsi Sebagai Sumber Hukum Islam* ", Jurnal Al-FIKRI, 3, 2010, hlm, 332.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan banyak hadis yang mmenjadi salah satu dasar atau sumber dari *Fiqh Maliyah* ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Adapun salah satu contoh hadisnya ialah³² :

“ siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah *Azz wa jalla* yang dalam keadaan marah kepadanya” (HR. Ahmad)

“ Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang miskin ialah seperti orang yang jihat di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa “ (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)

Adapun kaitan dengan kedua hadis diatas dengan keberadaan *siyasah maliyah* adalah salahsatu bentuk yang tidak bisa di pisahkan antara keduanya. Adapun seperti itu dikarenakan *fiqh siyasah* dapat dikatan sebagai suatu ilmu yang lahiir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi SAW.

C. Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*

Seperti didalam *fiqh siyasah dusturiyah* dan *siyasah dauliyah* , di dalam *fiqh siyasah maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, didalam *siyasah maliyah* ada hubungan di anantara tiga faktor, yaitu : rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam *siyasah maliyah* dibicarakan berbagai cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk menghormonisasikan dua keompok ini,

³² Ibid, hlm, 337.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar kesenjangan antara orang yang kaya dengan yang kurang mampu tidak semakin lebar³³.

Kajian *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al- Qur'an, Sunna Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khura'fa'al-Rasyidun, dan pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di madinah. *Siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

Menurut Abu Yusuf, sumber keuangan negara seperti yang dikutip T.M Hasbi ash-shiddieqy, meliputi *mawarid al-dawla* yang telah ditetapkan syara', yaitu *khumus al-ghana'im*, sedekah dan *kharaj*. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara islam hingga saat ini adalah zakat, *khumus al-ghana'im*, *al'fai'*, *jizyah*, *'usyr al-tijarah* dan pajak serta sumber harta-harta lainnya³⁴, Adapun diantara ialah :

1. Hak Milik

Islam menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara'.

³³ Op, Cit, Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm. 178

³⁴ Op. Cit. Muhammad Iqbal, *Sumber Kajian Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm, 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan oleh karena itu, orang islam juga menetapkan cara-cara melindungi hal milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan saksinya. Juga seorang pemilik harta mempunyai hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya, memberikannya dan lain sebagainya dari hak-hak tasaruf yang diperkenalkan *syara'* dan hak-hak pengambilan manfaatnya pembuktian adanya hal milik perseorangan ini misalnya dalam Al-Qur'an.³⁵ (An-nisa : 2)

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَبْدَلُوهَا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya : *dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampurkannya kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan itu adalah dosa besar.*

Disamping itu, hak-hak untuk mendapatkan warisan dan hak-hak mewaris juga membuktikan adanya hak milik. Hanya islam memberikan batas batas tentang hak milik perseorangan ini agar manusia mendapat kemaslahatan dan pengembangan harta tadi dalam menafkahkan dan dalam perpurannya³⁶.

Zakat

Zakat adalah sedekah, namanya berbeda subtansinya sama. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu muslim dari hartanya

³⁵ Op. Cit, Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* , hlm. 208.

³⁶ *Ibid*, hlm, 209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah *zakat*, lainnya tidak. Zakat dipungut dari harta yang ditunjukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu dipungut dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu sebagai pembersih dari pemiliknya dan bantuan pagi penerima zakat tersebut³⁷.

Zakat tidak hanya berupa uang jasa melainkan banyak hal yang bisa di zakatkan dalam islam. Yaitu zakat emas, zakat perak, zakat ternak, zakat fitrah, zakat buah buahan, dan kebutuhan pokok. Sebagai contoh pendapat ulama tentang harta yang wajib dizakati ini ialah³⁸ :

- a. Abu Hanifah, mewajibkan zakat pada segala hasil tanaman/buah-buahan baik berupa kurma ataupun buah-buahan lainnya.
- b. Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan, zakat hanya wajib pada buah-buahan yang dapat tahan satu tahun.
- c. Asy Syafi'i, zakat hanya wajib buah-buahan kurma dan anggur.

Abu Hanifah mewajibkan segala macam tanaman, sedangkan Asy Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan tidak mewajibkan pada sayur-sayuran. Asy Syafi'i hanya mewajibkan pada yang ditanam oleh manusia untuk makanan pokok yang dapat disimpan³⁹.

Zakat itu merupakan sumber pendapatan negara. Karena negara yang dibangun oleh Rasulullah itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, melainkan juga nonmuslim yang tidak terkena kewajiban *zakat*, maka sebagai imbalan kewajiban *zakat* terhadap muslim, kepada nonmuslim diwajibkan membayar pajak (*jizyah*). *Zakat* dilihat dari segi

³⁷ *Op. Cit.* Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, hlm, 326

³⁸ Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm, 217.

³⁹ *Loc. Cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip keuangan negara modern, mungkin dapat dilakukan suatu upaya untuk membedakan antara *zakat* dan sumber-sumber modern keuangan negara, walaupun bersifat regional-ekonomik *zakat* mempersulit tugas untuk membandingkannya dengan sumber bahan modern keuangan negara yang terdiri atas pajak, upah, harga taksiran khusus, tarif, dan sebagainya.

Walaupun keharusan merupakan suatu hakikat pajak dan *zakat*, tetapi secara pokok *zakat* berbeda dengan pajak karena *zakat* lebih komprehensif. Artinya *zakat* bukan hanya dibebankan pada tabungan, tapi juga pada harta benda.⁴⁰

3. Ghanimah

Harta *Ghanimah* (jamak : *ghanimah*) adalah harta yang diperoleh umat islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta *hanimah* ini diatur sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sejarah islam, perang pertama kali terjadi adalah perang Badar, yaitu pada abada 27 Ramadhan tahun dua Hijriah.

Dalam perang ini, umat islam berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy serta merampas harta benda dan menawan mereka. Pada saat itu, sebelum turun ayat tentang pembagian harta *ghanimah* ini, Nabi SAW membagi rata semua harta rampasan perang diantara tentara yang berperang.⁴¹

⁴⁰ *Op. Cit.* Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, hlm, 330.

⁴¹ *Op.Cit.* Muhammad Iqbal, hlm, 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di jelaskan juga dalam Al- Qur'an Surah Al- Anfal ayat 41 :⁴²

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

Artinya: "Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Di samping *ghanimah*, ini terdapat dua bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama, *salb*, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara muslim yang berhasil mengalahkan/ membunuh.. kedua, *fai*, yaitu harta yang diperoleh tanpa peperangan. Ini merupakan konsensi yang diberikan oleh pihak musuh yang tidak mau tunduk kepada islam dan melawan. Oleh karena al-mawardi, *fa'i* ini dimasukan juga kedalam harta *ghanimah*.⁴³

Jizyah

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk *dar al-islam* yang bukan Muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Meskipun jizyah merupakan pajak kepala

⁴² Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya, Penerbit Mahkota, Cet V, 2001, hlm, 482.

⁴³ *Ibid*, hlm, 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus diberikan oleh setiap non-muslim (*ahl al-adzimmi*) yang baligh, berakal, laki-laki dan mampu berperang, mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut bila tidak mampu membayarnya.

Karena itu, jizyah bukanlah tujuan utama dalam pemerintahan Islam, melainkan hanya wujud loyalitas mereka saja⁴⁴. Bahkan mereka yang tidak mampu membayar berhak mendapat tunjangan negara. Inilah kewajiban jizyah dalam Islam. Jizyah adalah bagian dari islam untuk menguasai harta *ahl-al-dzimmi*. Jizyah adalah bagian dari bentuk dakwah islam yang teduh dalam rangka mengajak mereka secara persuasif tanpa paksaan dan menerima islam.

Bila *ahl-al dzimmi* yang membayar zakat harta (sedekah) secara suka rela sebagaimana halnya zakat yang wajibkan atas umat Islam, maka kewajiban mereka membayar jizyah dianggap gugur. Hal ini sesuai dengan kebijakan Khalifah ‘Umar yang menerima sedekah *ahl al-kitab* sebagai kompensasi perjanjian damai mereka dengan umat Islam karena mereka keberatan dengan istilah jizyah. besarnya jumlah jizyah sangat relatif, tergantung pada kebijakan pemerintah. Pada zaman Nabi, Mu’adz bin jabal yang ditugaskan menjadi gubernur Yaman, diperintahkan menganbil jizyah dari penduduk setempat sebesar satu dinar. Perhitungan jizyah ini biasanya berdasarkan kelebihan yang dimiliki seseorang dari *in-commen-*nya setelah dikeluarkannya biaya untuk kebutuhan pokoknya⁴⁵.

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 323.

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 325.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fai’

Disebut dengan Fai’ dikarekan memanglah di karuniakan oleh Allash untuk umat Muslimin, Allah mengembalikan hak kaum Muslimin dari tangan orang kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan harta kekayaan itu semata dengan tujuan untu menolong para hama dalam beribadah kepada-Nya.

Sehingga kaum kafir yang semula membiarkan diri mereka tidak beribadah kepada-Nya lantas diberikan kepada hamba-hamnya-Nya yang beriman yang beribadah kepda-Nya, maka Allah melimpahkan harta *fai’* yang seharusnya mejadi hak mereka (kaum muslimin). Hal tersebut ini identik dengan dikembalikannya kepada seseorang sesuatu yang telah dirampas dari sisinya sekalipun dia belum pernah menyentuh (mengenal) suatu itu sendiri.⁴⁶

Harta yang dikumplkn dari *fai’* termasuk harta kekayaan negara (*al amwal al sulthaniyah*) yang menjadi milik administrasi *baitul mal* . begitu juga harta yang tidak bertuan, seperti seorang yang meninggal dunia yang tidak memeiliki ahli waris. Disamping itu juga berupa harta hasil jarahan, tanah tidak bertuan, harta bergerak, dan sejenisnya yang semuanya itu termasuk harta umat Muslimin.⁴⁷

Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-Muslim dan dalam

⁴⁶ *Op. Cit.* Mujaar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, hlm,340.

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 341.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas tanah umat Islam. Dalam sejarah, kata ini diambil umat Islam dari bahasa administratif Bizantium yang makna asalnya adalah “ upeti “ . Dalam bahasa Persia, kata ini disebut *Kharag*, semakna dengan *tributum* dalam bahasa Yunani pada masa kekuasaan Romawi masih jaya. Kata ini diterima menjadi kata Arab asli karena sama arti dengan hasil bumi, yang secara spesifik berarti pajak yang dibayar untuk pemilikan tanah⁴⁸.

Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu *kharaj* yang sebanding (proporsional) dan *kharaj* yang tetap. Jenis pertama dikenal dengan proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Adapun bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa dibedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, Muslim dan non-Muslim. Kewajiban membayar *kharaj* hanya sekali dalam setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa tiga atau empat kali panen dalam setahun⁴⁹.

Baitul Mal

Keberadaan Baitulmal sangatlah penting di masa sekarang ini, baitul mal ialah lembaga keuangan pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran negara. Baitul mal adalah pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk

⁴⁸ *Op. Cit.* Muhammad Iqbal, *Sumber Kajian Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm,

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 327



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁵⁰

Baitul Mal bertujuan untuk melaksanakan pembangaunan Negara dan untuk membangun negara yang ekonomi Modern. Harta Baitul Mal sebagai harta Muslim yang harus di jaga dengan pengelolaan dan pengeluaran hartanya. Dalam masa pemerintahan Khalifah peruntukan masalah-masalah ekonomi apa yang di hadapi umat muslimm. Umat muslim harus memperhitungkan dalam menetapkan sebagian Harta.⁵¹ kebutuhan warga negara dan Negara adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara
- b. Untuk meningkatkan supermasi hukum.
- c. Untuk orang fakir miskin.
- d. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
- e. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana.
- f. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

⁵⁰ Agus Marlin, “ Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian “, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 02 , Januari, 2014, hlm, 39.

⁵¹ Ibid, hlm, 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dari sumber keuangan Negara diatas, ada dua sumber keuangan Negara yang perlu diperhatikan, yaitu pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam dan penjaminan luar Negeri. Dalam hal yang pertama, keuntungan finansial dari pemanfaatan sumberdaya alam harus dapat dinikmati semua orang, bukan hanya segelintir atau sekelompok orang saja. Namun ini tidak berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam harus negara. Swasta pun dapat mengelolanya dengan catatan keuntungan yang diperolehnya tidak melebihi jasa dan efesiensi yang diperoleh.⁵²

Oleh karena itu, negara harus memberi kesempatan yang sama pada semua warga negara untuk ikut mengelola sumber daya alam yang ada. Tidak boleh ada monopoli kelompok tertentu untuk memeanfaatkan sumber daya alam, appa lagi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Amanat UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa bumi, air, dan segala sumber daya alam yang ada dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dalah prinsip yang sangat sesuai dengan semangat *Siyasah Syar'iyah*.

Dalam hal ini negara boleh mengundang pihak asing untuk melakukan investasi dalam pengelolaan sumber daya alam, asalkan tidak merugikan kepentingan Negara dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan rahyat Indonsesia. Hasil dari pengelolaan sumber daya alam

⁵² *Op. Cit.* Muhammad Iqbal, *Sumber Kajian Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm,

⁵² *Ibid*, hlm, 331.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian menjadi barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan baik didalam maupun di luar negeri. Hal ini lah yang harus di perhatikan bahwa pengelolaan sumber daya alam juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan tidak merusak lingkungan hidup. Islam tidak membenarkan eksploitasi sumber daya aalam yang merusak lingkungan hidup, sebab hal ini akan merugikan dan mengundang bencana bagi manusia itu sendiri.⁵³

Pengeluaran dan Belanja Negara

Suatu perkembangan kemajuan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur-jalur pengeluaran karena semua sudah ada peraturannya di dalam negara Islam. Tetapi lebih menarik lagi bahwa sejarah Islam dapat mencatat anggaran belanja negara dimasa Abbasiyah yang sudah ada dengan menyebutkan secara lengkap jenis-jenis pemasukan dan pos-pos pengeluaranya. Administrasi dan manajemen teratur dan rapi.⁵⁴

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan menolongnya dari kesusahan hidup serta kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam (*welfare state*). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak uniknya

⁵³ *Ibid*, hlm, 332.

⁵⁴ *Op. Cit.* Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, hlm, 358.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan dalam islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual rohani. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula pendapatan, pengeluaran dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti dikembangkan pada masa sekarang dan yang akan datang.⁵⁵

Mengenai pembembelanaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu⁵⁶:

- a. Untuk orang-orang fakir miskin.
- b. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara.
- c. Untuk meningkatkan supermasi hukum
- d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara:
- f. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik.
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Apapun bentuk pendapatan Negara lainnya merupakan wewenang penuh pemerintah dalam pengeluaran dan pendistribusiannya. Prinsip penting

⁵⁵ *Op. Cit.* Muhammad Iqbal, *Sumber Kajian Fiqh Siyasa*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm,

⁵⁵ *Ibid*, hlm, 333.

⁵⁶ *Ibid*, hlm, 335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus diperhatikan bahwa pengelolaan tersebut harus ditunjukan untuk mewujudkan keajahteraan masyarakat dan negara. Diantara pos-pos pengeluaran dan belanja negara yang terpenting adalah :

Memberantas Kemiskinan

Pemerintahan islam bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ii merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi Allah. Salah satu bentuk tugas pemerintahan Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara. Ini tidak hanya melalui zakat, juga tetapi melalui sumber-sumber keuangan lainnya.⁵⁷

Menimal Negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakatnya meliputi kebutuhan makanan, perumahan yang nyaman dan sandang ataupun pakain yang cukup. Dalam hal ini, belanja negara ditunjukan untuk menciptakan suasana dan iklim yang wajar dengan penataan dan peredaran semua kebutuhan tersebut di tengah-tengah masyarakat. dalam kondisi kritis, seperti krisis ekonomi atau bencana alam, pemerintah berkewajiban langsung mengeluarkan belanja negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya⁵⁸.

⁵⁷ *Ibid*, hlm, 338

⁵⁸ *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertahanan Negara

Pemerintahan perlu mengalokasikan belanja negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara secara khusus berbeda dalam tanggung jawab militer. Salah satu ciri negara yang kuat adalah kuatnya sektor militer dan tingginya tingkat komitmen mereka dalam pertahanan dan keamanan negara. Karena itu, negara harus mengeluarkan belanja yang layak dan proporsional untuk hal ini.

Pengeluaran ini antara lain untuk meningkatkan gaji personal militer, peningkatan kemampuan dan proporsionalisme mereka, dan biaya-biaya operasional militer lainnya, seperti membeli perlengkapan perang yang mutakhir dan pembiayaan latihan-latihan perang. Pengeluaran belanja yang wajar dan proporsional akan menjadikan militer negara sebagai benteng yang kokoh, sehingga tidak mudah disusupi oleh infiltrasi-infiltrasi asing manapun dalam negeri.⁵⁹

Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum merupakan hal yang penting dalam menata kehidupan dan ketertiban suatu negara. Dapat dipastikan, bila hukum tidak tegak dalam suatu negara, maka negara itu akan mengalami kehancuran dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, negara akan hancur. Karena itu pemerintahan Islam harus mengalokasikan belanja negara untuk pembangunan hukum. Pengeluaran belanja negara di bidang pembangunan hukum antara lain untuk peningkatan kualitas hakim, peningkatan taraf kesejahteraan hakim dan pencipta produk-produk hukum

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 339.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang antisipatif dan responsif terhadap perkembangan dan tantangan yang di hadapi.⁶⁰

Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Sosial

Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sehat dan makmur. Karena itu, pemerintah harus mengarahkan investasi di bidang modal fisik pada pembangunan ekonomi untuk pentingan sosial yang lebih besar, meskipun terkadang kurang menarik bagi investor swasta karna kurang memberi keuntungan. Salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dan perbaikan infrasetruktur seperti jalan umum maupun jalan layang, pembangunan irigasi, jembatan, bandara, layanan telekomunikasi dan pengadaan fasilitas untuk kegiatan ekonomi di luar.⁶¹

Berkaitan dengan hal ini, pengadaan sarana sosial seperti sarana kesehatan, panti jompo, bahkan penciptaan lapangan kerja merupakan kegiatan mutrak pemerintahan negara Islam. Pemerintah harus menyediakan alokasi dana belanja untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Di samping itu pemerintah harus dapat memberi pengarahan kepada masyarakat tentang cara hidup sehat, sehingga mereka betul-betul memperhatikan pola hidup mereka. Sebaliknya, rakyat dapat menuntut pemerintah untuk memenuhi fasilitas gizi, penyediaan air bersih,

⁶⁰ *Loc. Cit.*

⁶¹ *Ibid*, hlm. 340.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perumahan yang sehat, aman dan nyaman serta pembersihan lingkungan, kalau ada hal-hal tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah.⁶²

Pendidikan

Pemerintah sepatutnya memberi perhatian yang lebih besar kepada sektor pendidikan. Karena pendidikan merupakan hal yang penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wujud perhatian pemerintah dapat dilihat dari beberapa besar dana belanja negara untuk kepentingan di sektor ini. Semangat pentingnya pendidikan dapat dilihat dari pernyataan Nabi bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Selain meningkatkan sumber daya manusia pendidikan juga meningkatkan karakter moral dan akhlak yang baik. Sistem pendidikan islam berupaya menanamkan arti penting kerja keras dan efisiensi kepada peserta didik.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pendapatan negara harus juga mempertimbangkan nilai-nilai dasar ajaran islam. Pemerintahan tidak boleh menjadikan sumber pendapatan negara dari kegiatan-kegiatan yang dilarang agama, seperti memunggut pajak dari kegiatan maksiat, seperti lokalisasi prostitusi dan perjudian. Belanja dan pengeluaran negara tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik. Keduanya harus seimbang dilakukan oleh negara islam. Bila salah satu bidang ini terabaikan, maka cita-cita negara islam menciptakan kehidupan yang adil, makmur dan diridhai Allah SWT akan sulit terwujud.⁶³

⁶² *Ibid*, hlm. 341.

⁶³ *Ibid*, hlm. 342.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam menjalankan unit usaha, pasti didalamnya terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan dalam mencapai sebuah tujuan. Hal ini juga berlaku didalam menjalankan BUM Desa. Oleh karena itu, pengelolaan BUM Desa perlu berpegang teguh pada prinsip BUM Desa. Dalam menjalankan BUM Desa, ada enam prinsip yang menjadi pegangan pengelolaan, pemerintah dan warga masyarakat sebagai bagian dari BUM Desa, yaitu⁶⁴ :

1. Kooperatif

Prinsip kooperatif berarti bekerja sama. Didalam menjalankan dan mengelola BUM Desa, para pihak yang terlibat di BUM Desa harus mampu bekerja sama dengan baik. Prinsip Kooperatif sangat penting untuk lancarnya pengembangan dan kelangsungan usaha BUM Desa.

2. Partisipatif

Prinsip partisipatif ini berarti bersifat partisipasi. Semua yang menjadi bagian atau para pihak yang terlibat di dalam pengelolaan BUM Desa memiliki kewajiban dan kesadaran berpartisipasi penuh dalam memberikan dukungan dan kontribusi dalam upaya mendorong kemajuan usaha BUM Desa. Bentuk kontribusi yang terpenting adalah kemampuan Pegawai ataupun kualitas SDM, harus benar-benar memiliki kempuan, keahlian, dan kompetisi yang sesuai dengan bidang yang dijalankan di BUM Desa sehingga mampu secara maksimal berkontribusi kempuan sehingga mampu tepat sasaran dalam menjalankan unit usaha seperti BUM Desa.

⁶⁴ David Wijaya, “ *Mengelola Produksi BUM DESA Secara Profesional* “, Gava Media, Yogyakarta, 2020, hlm, 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emansipatif

Prinsip emansipatif ini bersifat emansipasi. Dalam pengelolaan dan menjalankan BUM Desa, para pihak yang terlibat dalam BUM Desa telah mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku, agama, strata sosial, atau jabatan.

Transparansi

Prinsip transparansi berarti dilaksanakan secara terbuka. Di dalam menjalankan dan pengelolaan BUM Desa, pengelolaan harus berlaku terbuka dalam setiap aktivitas yang dilakukan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk mengemukakan informasi.

5. Akuntabel

Prinsip akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan, terhadap kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban organisasi. Aktivitas yang dilaksanakan untuk usaha BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah secara teknis dan administratif⁶⁵.

Sustainabel

Prinsip sustainabel berarti kegiatan atau usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan masyarakat di dalam wadah BUM Desa. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan usaha yang berkelanjutan⁶⁶.

⁶⁵ *Ibid*, hlm, 84.

⁶⁶ *Loc, Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang di bahas oleh penulis mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dapat di simpulkan dalam beberapa poin yaitu :

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan BUM Desa Jaya Makmur Abadi yang bertempat di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar belum sesuai secara maksimal berjalan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana yang menjadi faktor penyebabnya dan hambatannya ialah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan usaha lokal yang didirikan Pemerintah Desa, dan kurangnya Pemahaman dan skil pegawai yang bertugas dalam pengelolaan BUM Desa Jaya Makmur Abadi, sehingga terdapat kesulitan dalam pengelolaan usaha yang didirikan BUM Desa seperti, Toko Harian, BRI Link, Jasa Pos, Ekspedisi J&T dalam proses pengembangan usaha, pendataan dan pembukuan.

Selain itu juga pada dapat dilihat dari proses pengelolaan dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pihak BUM Des untuk sekarang ini sudah mulai melakukan progres yang cukup bagus seperti halnya membuka Toko Harian, Jasa BRI Link, Jasa Pos dan Ekspedisi J&T serta penyediaan Penjualan Pulsa. Dalam rencana BUMDesa yang dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Ketua BUM Desa salah satunya mencapai keuntungan 5% perbulan dari keuntungan usaha BUM Desa 5% tersebut sebesar 7.650.000 perbulan dengan modal awal yang di dapat dari pemerintah desa untuk BUM Desa sebesar 153.000.000. Namun pada kenyataannya penjualan ataupun jasa usaha yang ada di BUM Desa setiap harinya tidak banyak hal ini di karenakan harga yang dipasarkan oleh bumdes sama dengan harga toko harian lainnya atau kadang sedikit lebih mahal serta persediaan barang yang kurang.

Berhubung BUM Des juga belum lama ada jadi kebanyakan masyarakat pun sudah berlangganan di tempat lain dan sedikit peminat di BUM Desa. adapun yang sedikit lebih banyak pelanggan ialan BRI link, namun dari hasil wawancara staf yang ada di BUM Desa untuk mencapai keuntungan 5% setiapnya belum terpenuhi dan belum cukup. Belum lagi adanya pemptongan untuk gaji bulanan pegawai yang bekerja di BUM Desa.⁶⁷

Namun diakui pula oleh ketua BUM Desa Jaya Makmur Abadi bahwasanya dalam pengelolaan BUM Desa yang mulai berkembang terdapat kesulitan dalam melakukan Administrasi dan pengelolaannya yang mana dikarenakan kurangnya pengetahuan pegawai BUM Desa itu sendiri dan masyarakat yang ada sehingga sangat diperlukan adanya pembinaan khusus dari pihak Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Desa serta Masyarakat yang ada di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung

⁶⁷ Putri Windi, Lely Silviani, Pegawai BUM Desa Jaya Makmur Abadi, Wawancara, Kijang Makmur kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, 2 januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilir Kabupaten Kampar terkhusus di BUM Desa demi mencapai pengetahuan dan kemampuan yang lebih berkompeten di bidang pengelolaan BUM Desa Jaya Makmur Abadi..

Pengelolaan BUM Desa Jaya Makmur Abadi apabila di lihat berdasarkan *Fiqh Siyasah* hampir maksimal namun belum berjalan dengan baik.

Dalam *Siyasah Maliyah* sebagai mana telah di jelaskan bahwasanya *Baitul Mal* ialah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Negara dan meningkatkan perekonomian Negara, sama halnya dengan BUM Desa yang mana juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Desa, meningkatkan sumber daya masyarakat, dan membantu meningkatkan ekonomi Desa yang mana Negara juga yang bertanggung jawab akan Kemajuan Desa.

Dalam BUM Desa ini juga mengatur pengeluaran dan pemasukan dari pendapatan yang sudah di peroleh melalui usaha yang di dirikan, di BUM Desa Jaya Makmur Abadi usaha yang ada ialah Toko Harian, Jasa BRI Link, Jasa Pos dan Ekspedisi J&T serta penyediaan Penjualan Pulsa. Apabila dilihat dari hasil penelitian yang sudah di jelaskan mengenai Pengelolaan BUM Desa Jaya Makmur Abadi terlihat sudah hampir maksimal dalam perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam menjalankan tugas bagaimana peranan serta fungsi BUM Desa itu sendiri dalam rangka memperhatikan dan mengelola Keuangan Negara.

B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan bagaimana kinerja kepegawaian di unit Desa agar lebih dapat membantu proses pengelolaan di setiap kelembagaan desa yang ada demi kemajuan Desa.
Diharapkan kepada pemerintah juga untuk dapat memberikan pelatihan ataupun pendampingan kepada staf atau pegawai yang bekerja di Pemerintahan Desa khususnya di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini.
3. Di harapkan juga kepada BUM Desa agar cepat tanggap dan inisiatif untuk mendiskusikan minimnya pengetahuan para staf dan pegawai dam mengelola BUM Desa kepada pemerintah terkait, seperti kepada Kepala Desa sehingga dapat dilakukan upaya pelatihan dan pendampingan.
4. Dikarenakan skripsi atau pun penelitian ini masih belum sempurna. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih bisa mengexplor, menjelaskan secara rinci lagi mengenai permasalahan seputar BUM Desa.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abdurrahman, Taj , *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir, Mathaba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- A. W Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004
- Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara*, Surabaya, 2014
- Al-Asiddieqi, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Hadist*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997
- Djazuli, *Implementasi kemaslahatan umat dan rambu-rambu syariah*, Kencana, Jakarta, 2003
- Eko, Sutoro. *Modul Pelatihan Petugas Pendampingan Desa, Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah, dan Daerah Tertinggal*
- Hartina Kusuma Wardani, Muhammad Tho'in, *Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara*, jurnal Akutansi dan Pajak, Vol 14, No 01, Juli 2013
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Konteks Doktrin Politik, Gaya Media*, Jakarta, 2000
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011)
- Pradja, Juhaya. *Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW Hingga AL-Hulafaur Ar-Rasyidin*, Kencana, Jakarta, 2003
- Raharjo, Muhamad Muiz, *Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Gva Media, Yogyakarta, 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Grafindo Persada. Depok.
- Samah, Abu. *Hukum dan Administrasi Pemerintahan desa*, 2019, Pekanbaru.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Sejak Muhammad SAW Hingga Hulafaur Rasyidin*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Syaif, Ibnu. Majur dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahe, Inu Kencana, *Sistem Administrasi Neagara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, 2003 Jakarta.

Wijaya, David. *Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, Yogyakarta, 2020.

JURNAL

Amalia Sri Kusuma Dewi, *Penerapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal of Rural an Development Volume V No.1 Februari 2014.

Marlin, Agus. *Baitu Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 2, Januari 2014

Muthara, Fahmi. 2017. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Persfektif Al-Quran*. Jurnal: Vol 2. No 1

Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Sebagai sumber Hukum Islam*, Jurnal Al-Fikri, Vol 3, 2010

Tasbihjimi, *Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis*, Jurnal Al-Ulum, Vol 2, No 1, Juni 2011

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DI DESA
KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR BERDASARKAN
UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**, yang ditulis oleh:

Nama : **HENNY RIZKY DIANTI**
NIM : 11724200660
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, MA

Penguji II
Bambang Hermanto, M.AG

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HENNY RIZKY DIANTI
NIM : 11724200660
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DI DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR BERDASARKAN UU NOMOR. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pembimbing: Rahman Alwi, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7141/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HENNY RIZKY DIANTI
NIM : 11724200660
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : BUMDES Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dekan H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BUMDES “ JAYA MAKMUR ABADI “
KECAMATAN TAPUNG HILIR
DESA KIJANG MAKMUR**

ALAMAT: Jln Poros Buana Wiralestari Kijang Makmur

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 004 / 03 / BUMDES / 2021

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Bangkinang Kota Nomer 070/BKBP/2020/769 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Menerangkan bahwa :

Nama : **HENNY RIZKY DIANTI**
NIM : 1172400660
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Bahwa atas nama yang tertera diatas telah melakukan riset/penelitian di BUM Desa “ **Jaya Makmur Abadi** “ di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir sejak tanggal 05 Januari 2021 s/d 08 Februari 2021 dengan Judul :

“TINJAUN *FIQH* SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DI DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA“

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kijang Makmur, 23 Maret 2021
Direktur BUMDes



MUHIRO HASIBUAN, Spd



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN TAPUNG HILIR KANTOR DESA KIJANG MAKMUR

ALAMAT: Jln Poros Buana Wiralestari – Kijang Makmur

KODE POS 28464

= SURAT KETERANGAN RISET =

Nomor : 140/SK-KM/213

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar,dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HENNY RIZKY DIANTI
NIM : 1172400660
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang : S 1

Nama yang tersebut diatas telah melakukan riset/penelitian di wilayah Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sejak tanggal 05 Januari 2021 s/d 08 Februari 2021 dengan judul penelitian “ **TINJAUN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DI DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA “**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kijang Makmur, 23 Maret 2021
Kepala Desa Kijang Makmur





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/769

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37274 tanggal 16 Desember 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : HENNY RIZKY DIANTI |
| 2. NIM | : 11724200660 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN
 BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KIJANG MAKMUR
 KECAMATAN TAPUNG HILIR BERDASARKAN UU NO. 6
 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
| 8. Lokasi | : BUMDES DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 21 Desember 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Tapung Hilir di Kota Garo.
2. Kepala Desa Kijang Makmur di Tapung Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37274
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7141/2020 Tanggal 11 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : HENNY RIZKY DIANTI |
| 2. NIM / KTP | : 11724200660 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
| 7. Lokasi Penelitian | : BUMDES DESA KIJANG MAKMUR KEC. TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Desember 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



HENNY RIZKY DIANTI, Lahir di Bagan Batu pada tanggal 27 Mei 1999. Anak pertama dari Tiga bersaudara, pasangan dari Ayahanda Yanuari dan Ibunda Suratmi. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 010 Desa Kijang Makmur, Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau. Lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Desa Kijang Jaya, Tapung Hilir, kabupaten Kampar, Riau. Dan lulus pada tahun 2014, setelah menyelesaikan pendidikan di SMP, penulis melanjutkan kuliah di Pondok Pesanteren Darul Hikmah Pekabaru dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa**”. Penulis dinyatakan lulus pada sidang Munaqasya tanggal 08 Juni 2021 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.55 (Cum laude) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).